

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Kebijakan Perlindungan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kulon Progo Tahun 2014 terkait Program Toko Milik Rakyat memiliki tahapan kesimpulan penelitian sebagai berikut :

- 1.) Tahap Perumusan masalah terkait pendirian TOMIRA adalah mengidentifikasi permasalahan semakin maraknya Alfamart dan Indomaret berdiri di Kabupaten Kulon Progo. Toko berjejaring Alfamart dan Indomaret menggosur keberadaan pasar tradisional dan UMKM. Sehingga pemerintah daerah Kulon Progo berinisiatif merumuskan Peraturan Daerah.
- 2.) Tahap Agenda kebijakan terkait pendirian TOMIRA adalah penyusunan Prolegda Tahun 2011. Bupati membahas Rancangan Peraturan Daerah bersama DPRD dan OPD .
- 3.) Tahap Pemilihan alternatif masalah terkait pendirian TOMIRA adalah terbentuknya Perda No. 11/2011 dan pengaturan zonasi 1000 meter berdirinya toko modern dengan pasar tradisional.
- 4.) Tahap Penetapan kebijakan terkait pendirian TOMIRA adalah hasil pembahasan dan penetapan Perda No. 11/2011 dengan terbentuknya program kebijakan Toko Milik Rakyat (TOMIRA). Kemitraan toko modern dengan pengelolaan Koperasi. Berdirinya Toko Milik Rakyat (TOMIRA) membangkitkan kesadaran masyarakat akan kecintaan,

kepedulian, keberpihakan terhadap produk-produk UMKM lokal Kulon Progo dalam rangka mewujudkan kemandirian ekonomi dan kedaulatan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo.

B. SARAN

Kebijakan Perlindungan Ekonomi Kreatif di Kabupaten Kulon Progo berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Tradisional serta Penataan Pusat Perbelanjaan memiliki saran penelitian sebagai berikut :

- 1.) Kebijakan Perda No. 11/2011 harus dilakukan peninjauan kembali oleh pemerintah, DPRD, dan organisasi perangkat daerah mengenai ketentuan pendirian dan pembahasan program kebijakan TOMIRA di Kabupaten Kulon Progo.
- 2.) Revitalisasi dan pembangunan sarana penunjang pasar tradisional harus dijalankan secara optimal seperti los, kios, wc pasar, dan drainase. Upaya ini bertujuan untuk mewujudkan kebersihan pasar, kesehatan pasar, dan peningkatan kompetensi pengelolaan pasar.
- 3.) Program pemerintah daerah Toko Milik Rakyat (TOMIRA) harus dijadikan prioritas utama untuk pembinaan UMKM, pemberdayaan UMKM, dan pengelolaan badan usaha Koperasi.